

**DAFTAR BACAAN****BUKU**

- Asmara, Galang, *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: BIP Kelompok Gramedia, 2008.
- Effendy, Marwan, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2004.
- Fahmal, H.A. Muin, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Marbun, SF. *Hukum Administrasi Negara II*. FH UII Press : Yogyakarta, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Mochtar, Zainal arifin, *Lembaga Negara Independen*, Rajawali pers, 2016.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Mustafa, Bachsan, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Purmono, R Widyo, *Pemberantasan Korupsi Dan Pidana Lainnya*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016.

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Jakarta Pusat, 2016.

Sekretariat Jenderal KY RI, *Risalah Komisi Yudisial : Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*.

Siagian, Sondang P. *Filsafat Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung, 1980.

Sujanto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Tauda, Gunawan A, *Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Pranata Hukum. Vol.6 No. 2, 2011.

## **JURNAL**

Basuki, Ahmad, *Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Perspektif, Volume XVIII No. 1, Edisi Januari Tahun 2013.

Desiana, Ayu, *Analisis konsep pengawasan ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan public*, jurnal ilmu hukum, Vol.6 No.2 , 2013.

Fauzi, Anas, *Memperkuat Pengawas Internal Sebagai Quality Assurance*, Majalah Dwiwulanan BPK RI, ISSN : 0216-8154.

Fitria, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Universitas Tanjungpura, 2012.

Hadi, Syofyan, *Prinsip Checks And Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia (Studi Terhadap Usulan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945)*, jurnal ilmu hukum, edisi : Januari- Juni 2014.

Hariadi, Tunjung Mahardika, *Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Negara Singapura Dan Indonesia*, Recidive Volume 2 No. 3 Sept.-Desember 2013.

Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Al'Adl, Volume IX Nomor 3, ISSN 1979-4940/ ISSN-E 2477-0124, Desember 2017.

Ilmiati, *Sistem Pengawasan Lembaga Peradilan Di Indonesia*, Bilancia, Vol. 11 No.1, Januari-Juni 2017.

Indonesia Corruption Watch, *Pengujian Oleh Public (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, ISBN : 978-979-1434-23-2, September 2016.

Indraputra, Tjokorda Gde, dan Bagiastra, I Nyoman, *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga Negara bantu (state auxiliary institutions)*, Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 .

Josef M. Monteiro, *Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-42 No.2 April-Juni 2012.

Mappi-FHUI, *Media Hukum Dan Keadilan (Teropong)*, Volume 1, ISSN 1412-7288, November 2013

Mudzakkir, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi : Tindak Pidana Biasa Penanganannya Luar Biasa (Corruption Court : Common Crime With Extraordinary Reduction)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No.2, ISSN 2579-5562, Juni 2011.

Nurtjahjo, Hendra, *Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Tahun Ke-35, No.3 Juli, September 2005

Rahyani, Wiwin sri, *Independensi Otoritas Jasa keuangan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan*, Jurnal legislasi Indonesia, vol. 9 No.3, Oktober 2012

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Jakarta Pusat, 2016.

Sekretariat Jenderal KY RI, *Risalah Komisi Yudisial : Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*, h. xi.

Solechan, *Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia*, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 1 Edisi 2 Mei 2018, ISSN 2621 – 2781 Online.

Sonatra, Pandji Ndaru, Novianto, Widodo Tresno dan Riewanto, Agus, *Konstruksi Pengawasan Independen Untuk Mencegah Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.1, Januari 2019, H.63

Suntoro, Agus, *Penyadapan Dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 No. 1 - Maret 2020.

Sunarto, *Prinsip Checks And Balances Dalam Sisem Ketatanegaraan Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No.2 , April 2016

Telaumbanua, Dalinama, *Restriktif Status Dewan Pengawas Kpk*, E.Issn.2614-6061, P.Issn. 2527-4295 Vol.8 No.1 Edisi Februari 2020, Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan.

Zoelva, Hamdan, *Tinjauan Konstitusional Penataan Lembaga Non-Struktural di Indonesia*, Jurnal Negarawan, Sekretariat Negara RI, November 2010,

**SKRIPSI**

Farhan, Muhammad, *Perbandingan Pola Kerja Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan korupsi Indonesia Dan Independent Commission Against Corruption Hongkong*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2013.

Gusman, Derry, *Tugas Dan Kwenangan Komisi Kejaksaan Republic Indonesia Di Dalam Pengawasan Fungsi Jaksa Berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Manday, Tomi Marlin, *Studi Konseptual Mengenai Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018Rahmat, Aulia, *Urgensi Pengawasan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Wahyuni, Hasra, *Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Sistim Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

**INTERNET**

Dua Professor Hukum Pidana Beda Pandangan Soal Dewan Pengawas KPK,  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56b9d64245b97/dua-profesor-hukum-pidana-beda-pandangan-soal-dewan-pengawas-kpk/>.

DPR RI, Naskah Akademik rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .. Tahun .. tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, Jakarta, 2016.  
<http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170608-102159-3123.pdf>.

Firdaus, Fahmi Ramadhan Keberadaan KPK dalam Upaya Pemberantasan Korupsi,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ca466cb7f8ed/keberadaan-kpk-dalam-upaya-pemberantasan-korupsi/>.

Gatra.com, <https://www.gatra.com/detail/news/468978/hukum/mantan-ketua-kpk-dewan-pengawas-lemahkan-kpk>.

Humas kemensetneg, Presiden Jokowi: KPK Perlu Dewan Pengawas untuk TangkalPenyalahgunaanWewenang,[https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden\\_jokowi\\_kpk\\_perlu\\_dewan\\_pengawas\\_untuk\\_tangkal\\_penyalahgunaan\\_wewenang/](https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_kpk_perlu_dewan_pengawas_untuk_tangkal_penyalahgunaan_wewenang/).

Ihsanudin, Yasonna Sebut Dewan Pengawas untuk “Check and Balances” di KPK,  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/09/13152521/yasonna-sebut-dewan-pengawas-untuk-check-and-balances-di-kpk?page=all>.

Komara, Indra, <https://news.detik.com/berita/d-4706609/refly-harun-dewan-pengawas-cikal-bakal-pelemahan-kpk>.

Mardatillah, Aida, Kewenangan Dewan Pengawas KPK Disebut Lampau Batas Pengawasan,  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5daea72d91232/kewenangan-dewan-pengawas-kpk-disebut-lampau-batas-pengawasan/>.

Maulana, Arif, Apa itu pro justitia?,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e006f96d6231/apa-itu-ipro-justitia-i/>.

Novellino, Andry, <https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20190920204301-32-432456/Dewan-Pengawas-Dan-Segudang-Curiga-Intervensi-Pada-Kpk>.

Struktur organisasi KPK, <http://www.kpk.go.id/id/tentangkpk/struktur-organisasi/deputi-pipm>.

Setyawan, Feri Agus, Yusril Sebut KPK Perlu Dewan Pengawas,  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190911180426-12-429585/yusril-sebut-kpk-perlu-dewan-pengawas>.

Widianto, Satrio, Menimbang Urgensi Dewan Pengawas KPK,  
<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01319127/menimbang-urgensi-dewan-pengawas-kpk?page=2>.